



## PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2023

Binti Wasi'aturohmah<sup>1</sup> Asis Riat Winanti<sup>2</sup> Sayid Abas<sup>3</sup>

### Article history:

Submitted: 24 Januari 2025

Revised: 08 Februari 2025

Accepted: 14 Februari 2025

### Keywords:

Partial Unemployment rate;

Provincial minimum wage;

Banten Province;

Workforce;

### Kata Kunci:

Angkatan kerja;

Tingkat pengangguran; Upah

minimum provinsi; Provinsi

Banten;

Parsial;

### Koresponding:

Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Ponorogo,

Jawa Timur, Indonesia

Email:

[bintiwasiaturohmah@gmail.com](mailto:bintiwasiaturohmah@gmail.com)

om

### Abstract

*The aim of this study is to analyze the impact of the provincial minimum wage (UMP) and the size of the workforce on the unemployment rate in Banten Province in 2010-2023. As a regional economic policy, the UMP is considered to play an important role in influencing the unemployment rate, while the size of the workforce, which is a demographic variable, can also influence employment conditions. The data used in this study is in the form of secondary data using a quantitative approach and multiple linear regression. Data source from BPS Banten Province. The findings from the analysis show that the UMP partially has a negative effect on the unemployment rate, while the labor force partially has a positive effect on the unemployment rate. Simultaneously, both the UMP and the labor force have an influence on the unemployment rate in Banten Province. With the government programme above, it is hoped that it can reduce the labour force and minimise the unemployment rate in Banten Province, and with this it is hoped that Banten Province will no longer be the province with the highest unemployment rate in Java.*

### Abstrak

Studi ini bertujuan untuk analisis dampak upah minimum provinsi (UMP) dan jumlah angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2010-2023. Sebagai salah satu kebijakan ekonomi daerah, UMP dianggap berperan penting dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, sementara jumlah angkatan kerja yang merupakan variabel demografis juga dapat memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Data yang dipakai pada studi ini berbentuk data sekunder melalui pendekatan kuantitatif dan regresi linear berganda. Sumber data dari BPS Provinsi Banten. Temuan dari analisis menunjukkan bahwa secara parsial UMP berpengaruh negatif dengan tingkat pengangguran, sedangkan angkatan kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Secara simultan, baik UMP maupun angkatan kerja memberi pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Dengan adanya program pemerintah di atas diharapkan bisa mengurangi angkatan kerja dan meminimalkan tingkat pengangguran pada Provinsi Banten, dan dengan ini diharapkan Provinsi Banten tidak lagi menjadi Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa.

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia<sup>2,3</sup>

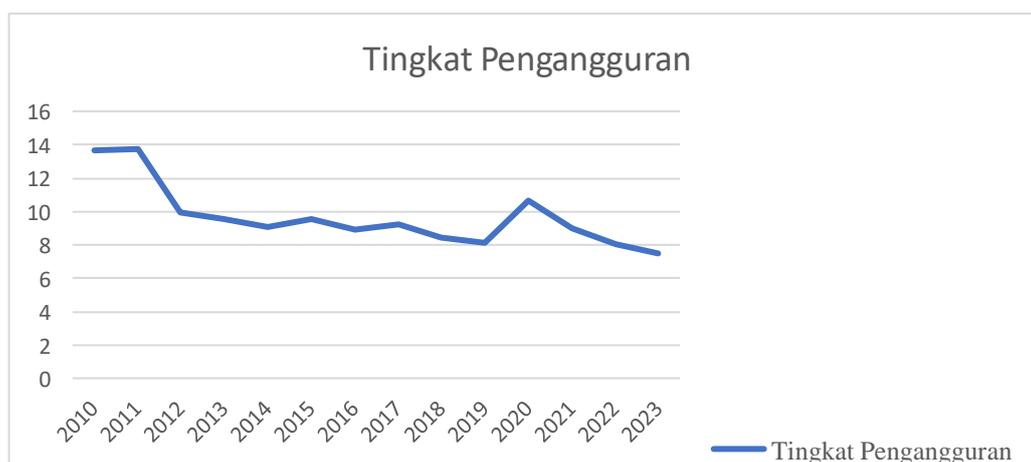
Email: [asisriat@umpo.ac.id](mailto:asisriat@umpo.ac.id)<sup>2</sup>

Email: [abas@umpo.ac.id](mailto:abas@umpo.ac.id)<sup>3</sup>

## PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan masalah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh minimnya lowongan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari pekerja hingga menyebabkan lapangan kerja tidak optimal dan permasalahan seperti kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, dan pengangguran (Salsabila *et al.*, 2023). Peningkatan jumlah pengangguran ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pekerja akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan kurangnya lapangan kerja baru. Di negara berkembang seperti Indonesia terlalu sulit untuk mengurangi masalah pengangguran karena berbagai kendala seperti: kurangnya kesempatan kerja, upah minimum provinsi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kurangnya investasi, kondisi social kurang mendukung serta permasalahan politik. Hal itu menjadi faktor yang membuat pengangguran sulit untuk diatasi (Ningsi, 2023).

Pemerintahan Indonesia telah mengambil berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatasi pengangguran, namun untuk mengurangi tingkat pengangguran penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi pengangguran yaitu upah minimum dan angkatan kerja yang ini perlu dipahami untuk mengurangi tingkat pengangguran (Badria, 2022). Permasalahan ini juga terjadi di Provinsi Banten dengan provinsi termuda pada lingkup pulau Jawa dengan tingkat pengangguran tertinggi Indonesia pada tahun 2023. Menurut (ILO, 2017) dalam (Salsabila *et al.*, 2023). Fenomena pengangguran dapat memiliki banyak penyebab, termasuk upah minimum dan angkatan kerja. Provinsi Banten termasuk sebuah provinsi di Jawa yang juga mengalami masalah pengangguran. Tingkat pengangguran Provinsi Banten pada tahun lalu menjadi pengangguran tertinggi di Indonesia. Gambar 1 adalah grafik yang menggambarkan tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2010-2023.

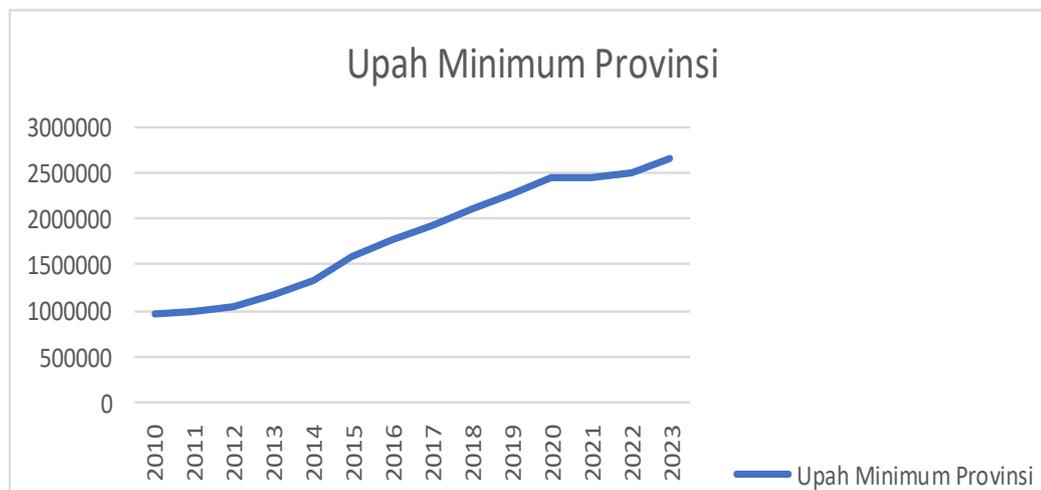


Sumber: BPS, 2024

**Gambar 1. Tingkat Pengangguran Provinsi Banten Tahun 2010-2023**

Faktor pertama yaitu upah minimum merupakan aspek yang mempengaruhi tingkat angkatan kerja dan masalah pengangguran. Tren peningkatan tingkat upah dapat meningkatkan minat pencari kerja terhadap jaminan upah dari perusahaan, tetapi keadaan ini juga bisa berbanding terbalik dengan dunia usaha, karena menaikkan upah minimum di atas harga pasar dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Peningkatan ini menyebabkan banyak pengusaha yang melakukan PHK dan angka pengangguran pun meningkat. Upah minimum di Provinsi Banten cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tingkat pengangguran (Abdianti & Novera, 2024). Selain itu, upah minimum dan jumlah tenaga kerja merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat pengangguran yang tercatat, dan keduanya juga berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Upah minimum

adalah batas gaji yang ditetapkan oleh pemerintah untuk para pekerja. Kebijakan terkait upah minimum dapat berdampak pada tingkat pengangguran karena keputusan bisnis dalam merekrut dan mempertahankan karyawan dapat dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Jika upah minimum terlalu tinggi, hal itu dapat menyebabkan PHK dan berkurangnya investasi, yang berujung pada meningkatnya pengangguran (Erlangga *et al.*, 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdianti & Novera (2024) menyebutkan bahwa upah minimum provinsi memberikan pengaruh positif yang berdampak pada tingkat pengangguran. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Khusnul (2019) yang menemukan upah minimum berpengaruh dengan hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran.



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2. UMP Provinsi Banten Tahun 2010-2023**

Gambar 2 menunjukkan pada tahun 2010-2023 Upah Minimum Provinsi Banten mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Dengan adanya kenaikan upah minimum itu diharapkan bisa membantu tenaga kerja dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan bisa mengurangi tingkat pengangguran.

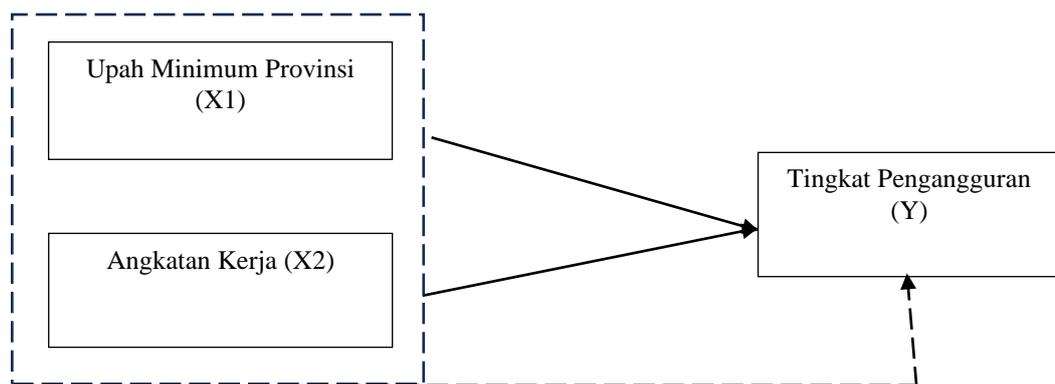
Adapun faktor kedua ialah angkatan kerja, yang mencakup jumlah penduduk yang berkeinginan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja memberi dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran yang tercatat. Pengangguran di pasar tenaga kerja dipandang sebagai fenomena struktural, yang menunjukkan kesenjangan antara jumlah total lowongan pekerjaan dan jumlah pencari kerja atau karyawan yang bersedia bekerja (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022). Jika angkatan kerja meningkat tanpa pertumbuhan lapangan kerja yang memadai, tingkat pengangguran yang dipublikasikan mungkin akan meningkat (Erlangga *et al.*, 2024). Menurut Mulyadi (2014) dalam Abdianti & Novera (2024). Angkatan kerja juga dapat memengaruhi tingkat pengangguran. Semakin tinggi angkatan kerja, semakin positif dampaknya. Bilamana kenaikan kesempatan kerja disertai dengan peningkatan tingkat ketenagakerjaan maka peningkatan kesempatan kerja tidak sama dengan peningkatan tingkat ketenagakerjaan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran karena terbatasnya kesempatan kerja untuk menampung angkatan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Suriati (2020) menjelaskan jumlah angkatan kerja memberikan pengaruh positif yang berdampak pada tingkat pengangguran, sedangkan dalam penelitian Khusnul (2019) menyebutkan bahwa angkatan kerja berpengaruh negatif dan berdampak pada tingkat pengangguran.

Beberapa penelitian telah menganalisis pengaruh dari upah minimum terhadap tingkat pengangguran (Yeimo dan Ayuningsasi, 2022; Studi ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya Erlangga *et al.* (2024), Abdianti & Novera (2024) terkait penggunaan variabel upah minimum provinsi

dan angkatan kerja dalam menganalisis pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan objek dan tahun pengamatan. Hal ini memberikan kontribusi yang lebih luas dan spesifik dalam memahami hubungan antara upah minimum provinsi dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2010-2013.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi kuantitatif dengan menganalisis data statistik sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data tahunan *time series* tahun 2010-2023. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah regresi linier berganda. Proses pengujian dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS versi 16.



Sumber: (Juliandi Azuar, irfan, 2014)

**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
upah minimum provinsi	14	955300	2661280	1,80E	621647,079
angkatan kerja	14	5125057	6463631	5,67E	453833,846
tingkat pengangguran	14	7,52	13,74	9,680	1,885
Valid N (listwise)	14				

Sumber: Data diolah, 2025

Melihat data deskriptif pada Tabel 1 yang ada pada penelitian mengenai pengaruh Upah Minimum Provinsi dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2010-2023, dapat dianalisis nilai minimum, maksimum, mean, serta standar deviasi setiap variabel.

Variabel Upah Minimum Provinsi (X1), nilai minimum senilai 955300 dan maksimum 2661280, dengan rata-rata (mean) senilai 1,80E, standar deviasi 621647,079. Angkatan Kerja (X2) nilai minimum 5125057 dan maksimum 6463631, dengan rata-rata (mean) senilai 5,67E, standar deviasi 453833,846. Tingkat Pengangguran (Y) nilai minimum senilai 7,52 dan maksimum 13,74, dengan rata-rata (mean) senilai 9,680, standar deviasi 1,885.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		14
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	0,000
	Std. Deviation	1,212
Most Extreme Differences	Absolute	0,155
	Positive	0,155
	Negative	-0,100
Kolmogorov-Smirnov Z		0,581
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,889

*Sumber:* Data diolah, 2025

Berdasarkan dalam tabel 2, dipahami jika unstandardized residual mempunyai skor Asymp. Sig senilai  $0,889 < 0,05$ , untuk itu bisa dinyatakan data mempunyai distribusi normal.

Uji multikolinieritas mengevaluasi hubungan antar variabel independent dalam model regresi. Multikolinieritas diukur dengan nilai VIF dan toleransi. Model regresi dianggap kuat jika toleransi  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ . Disajikan pada Tabel 3 hasil uji multikolinieritas. Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa tidak ada multikolinieritas karena hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel independent atau bebas dengan angka *tolerance* serta VIF pada variabel upah minimum provinsi yaitu sebesar 0,131 dan 7,625, angkatan kerja sebesar 0,131 dan 7,625 artinya angka *tolerance* menunjukan  $> 0,10$  serta angka VIF menunjukan  $< 10,00$ .

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	upah minimum provinsi	0,131	7,625
	angkatan kerja	0,131	7,625

*Sumber:* Data diolah, 2025

Uji heteroskedastisitas mengevaluasi apakah varians residual bervariasi di berbagai model regresi. Tidak adanya heteroskedastisitas menunjukan model regresi yang kuat. Dalam riset ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan bantuan SPSS Statistics 16, dan hasilnya ditunjukan pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4, nilai residual mempunyai nilai Sig.tailed (2-tailed)  $> 0,05$  dimana setiap variabel yaitu 0,917;0,970. Maka kesimpulan yang diperoleh adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

			<b>Upah Minimum Provinsi</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>Unstandardized Residual</b>
Spearman's Rho	Upah Minimum Provinsi	Correlation Coefficient	1,000	0,911**	-0,031
		Sig. (2-Tailed)	0,	0,000	0,917
		N	14	14	14
Angkatan Kerja	Angkatan Kerja	Correlation Coefficient	0,911**	1,000	0,011
		Sig. (2-Tailed)	0,000	0,	0,970
		N	14	14	14
Unstandardized Residual	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-0,031	0,011	1,000
		Sig. (2-Tailed)	0,917	0,970	0,
		N	14	14	14

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 5 adalah tabel hasil Uji Autokorelasi, Koefisien Determinasi, Koefisien Korelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah residual dari data historis memberikan pengaruh pada titik data berikutnya. Dalam melakukan uji ini, kesimpulan diambil berdasarkan statistic Durbin-Watson (DW), yang idealnya berada dalam interval -2 hingga 2 untuk menunjukan adanya autokorelasi dalam kumpulan data. Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat. Uji koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel. Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa nilai DW senilai 1.870 dibedakan sama nilai tabel DW atas nilai  $N=14$  serta 2 variabel independent (k), sehingga pada tabel DW hendak dihasilkan skor (DL) = 0,660 serta skor (DU) = 1,254 hingga  $4-DU = 4 - 1,254 = 2,746$ . Berdasarkan output bisa ditinjau nilai DW senilai 1,870. Sebab nilai DW ada dari DU serta  $4-DU$  ( $0,660 < 1,870 < 2,746$ ) sehingga mustahil terjadinya autokorelasi.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Autokorelasi, Koefisien Determinasi, Koefisien Korelasi**

<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>	<b>Durbin-Watson</b>
1	0,766 <sup>a</sup>	0,586	0,511	1,318	1,870

Sumber: Data diolah, 2025

Tujuan dari analisis regresi linier berganda ialah untuk mengidentifikasi arah hubungan antar variabel yang ada, apakah dari variabel independen berhubungan secara positif atau negatif, serta untuk memperkirakan perubahan nilai variabel independen, apakah akan meningkat atau menurun (Anggara *et al*, 2023). Menurut Sulistyono & Sulistiyowati (2017) dalam Padilah & Adam (2019) uji T digunakan untuk mengindikasikan apakah dalam model regresi, variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Tabel 6 adalah tabel yang menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda dengan analisis uji t.

**Tabel 6.**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda, Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-4,597	9,958		-0,462	0,653
	upah minimum provinsi	-4,814	0,000	-10,587	-2,965	0,013
	angkatan kerja	4,047	0,000	0,974	1,819	0,096

Sumber: Data diolah, 2025

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -4,597 + (-4,814).x_1 + 4,047.x_2 + e$$

Nilai konstanta -4,597. Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel  $x_1$ ,  $x_2$  bernilai 0 untuk itu variabel Y (Tingkat Pengangguran) sebesar -4,597. Nilai koefisien regresi sebesar -4,814 maka dapat diketahui jika variabel independent yaitu upah minimum provinsi atas nilai -4,814. Artinya memperlihatkan terjadinya kenaikan upah minimum provinsi dengan besaran 1 persen akan adanya penurunan tingkat pengangguran senilai -4,814 persen yang diasumsikan bahwa variabel independent (bebas) yang lain nilainya konstan. Nilai koefisien regresi sebesar 4,047 maka dapat diketahui jika variabel independent yaitu angkatan kerja atas nilai 4,047. Artinya memperlihatkan terjadinya kenaikan nilai angkatan kerja dengan besaran 1% akan menaikkan tingkat pengangguran senilai 4,047 persen yang diasumsikan bahwa variabel independent (bebas) yang lain nilainya konstan.

Berdasarkan Tabel 6, yaitu pengujian secara parsial terlihat bahwa pengujian pengaruh upah minimum provinsi pada tingkat pengangguran mempunyai nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  (-2,965 > 1,782) serta skor signifikan sejumlah  $0,013 < 0,10$  jadi upah minimum provinsi berpengaruh dengan hubungan negatif dalam taraf kesalahan 10 persen dengan tingkat pengangguran. Pengujian pengaruh angkatan kerja pada tingkat pengangguran mempunyai nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  (1,819 > 1,782) serta skor signifikan sejumlah  $0,096 < 0,10$  jadi terdapat pengaruh  $H_a$  diterima  $H_o$  diterima dalam taraf kesalahan 10 persen pada angkatan kerja dengan tingkat pengangguran.

Uji F berguna untuk mengindikasikan apakah semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Padilah & Adam, 2019). Tabel 7 memuat hasil uji F. Berdasarkan Tabel 7 memiliki persamaan  $F_{hitung} < F_{tabel}$  (7,796 > 6,93) serta nilai signifikansi yaitu  $0,008 < 0,05$  hingga variabel upah minimum provinsi dan angkatan kerja secara serempak berpengaruh terhadap variabel Y.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27,107	2	13,554	7,796	0,008 <sup>a</sup>
	Residual	19,124	11	1,739		
	Total	46,232	13			

Sumber: Data diolah, 2025

Setelah melakukan pengamatan menunjukkan variabel upah minimum provinsi berpengaruh dengan hubungan negatif dalam taraf kesalahan 10 persen dengan tingkat pengangguran. Dengan melihat dari hasil pengujian uji t dengan  $t_{hitung} > t_{tabel} = -2,965 > 1,782$  serta skor signifikan sejumlah  $0,013 < 0,10$ . Meningkatnya upah minimum provinsi berdampak pada penurunan tingkat

pengangguran, dengan demikian makin tinggi upah minimum provinsi maka tingkat pengangguran akan makin menurun. Ini sejalan dengan Teori Philips yang dikemukakan oleh Kusenendi (2015) dalam Khusnul (2019). Terdapat hubungan negatif antar peningkatan upah dan tingkat pengangguran. Artinya, tingkat pertumbuhan upah yang tinggi sering dikaitkan dengan tingkat pengangguran yang rendah, sementara ketika laju pertumbuhan upah rendah, tingkat pengangguran cenderung meningkat. Studi ini selaras juga terhadap kajian yang dilakukan terhadap Kurniawan *et al.* (2021) bertepatan “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jambi”. Temuan penelitian menunjukkan dimana variabel upah minimum mempunyai pengaruh dengan hubungan negatif dan berdampak pada tingkat pengangguran dengan nilai koefisien sebanyak -1,859. Seterusnya, pada penelitian yang diteliti Badria (2022) juga mengatakan apabila terjadi peningkatan upah sebanyak 1 persen, maka tingkat pengangguran akan berkurang sebanyak -0,238 persen.

Setelah melakukan pengamatan menunjukkan jika variabel angkatan kerja berdampak secara parsial dengan  $H_a$  diterima dan  $H_o$  diterima pada tingkat pengangguran. Dengan melihat dari hasil pengujian uji  $t$  dengan  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $1,819 > 1,782$ ) serta skor signifikan sejumlah  $0,096 < 0,10$ . Hal ini bisa terjadi apabila jika angkatan kerja bertambah, maka tingkat pengangguran cenderung akan meningkat. Aspek tersebut sesuai dengan studi yang dilaksanakan terhadap Suriati (2020). Penelitian tersebut mencatat bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  diterima, bisa dikatakan dimana jumlah angkatan kerja mempunyai pengaruh dengan hubungan positif dan berdampak pada tingkat pengangguran. Seterusnya, pada penelitian yang diteliti Silvie & Hasmarini (2023) mencatat bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  diterima, bisa dinyatakan jika angkatan kerja mempunyai pengaruh dengan hubungan positif dan berdampak pada tingkat pengangguran.

Berdasarkan temuan pengujian yang sudah dilakukan mengindikasikan perihal variabel upah minimum provinsi dan angkatan kerja mempunyai dampak yang bersamaan pada tingkat pengangguran. Melihat dari hasil pengujian hipotesis uji  $F$  secara skor  $F$  hitung  $< F$  tabel ( $7,796 > 4,46$ ) serta skor signifikansi yaitu  $0,008 < 0,05$  jadi secara simultan variabel upah minimum provinsi dan angkatan kerja mempunyai pengaruh pada tingkat pengangguran.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa kenaikan upah minimum provinsi menyebabkan penurunan pada tingkat pengangguran, sehingga bisa dikatakan kalau upah minimum provinsi berpengaruh dengan hubungan negatif dalam taraf kesalahan 10 persen dengan tingkat pengangguran. Selain itu, angkatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, bisa dikatakan bahwa angkatan kerja mengalami peningkatan maka tingkat pengangguran semakin bertambah. Temuan uji coba yang dilakukan secara bersamaan mengindikasikan jika upah minimum provinsi dan angkatan kerja mempunyai pengaruh yang simultan pada tingkat pengangguran. Dengan demikian bisa dikatakan jika upah minimum dan angkatan kerja menjadi pengaruh adanya tingkat pengangguran. Temuan ini dapat digunakan bagi referensi peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup mengingat penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan pemenuhan.

Berdasarkan hasil kajian dan simpulan yang diperoleh, bisa dikembangkan beberapa saran bagi pihak yang berkepentingan dalam kajian ini. Bagi Pemerintah Provinsi Banten setiap tahunnya harus menaikkan Upah Minimum Provinsi yang skalanya sama dengan jam kerja karyawan biasa, pelatihan ketrampilan bagi lulusan sma supaya mempunyai skill, memperbanyak membuka lowongan kerja bagi *freshgraduate* hingga bisa membuat masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya program pemerintah diatas diharapkan bisa mengurangi angkatan kerja dan meminimalkan tingkat

pengangguran pada Provinsi Banten, dan dengan ini diharapkan Provinsi Banten tidak lagi menjadi Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa.

## REFERENSI

- BPS), (2024). Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Banten. Diakses pada 3 Oktober 2024, dari <https://banten.bps.go.id>
- BPS), (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten. Diakses pada 3 Oktober 2024, dari <https://www.bps.go.id>
- BPS), (2024). Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Banten. Diakses pada 3 Oktober 2024, dari <https://banten.bps.go.id>
- Abdianti, Dini, and Novera Martilova. "Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Sumatera Barat." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 3.4 (2024): 270-286. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i4.3132>.
- Anggara, A., Auliasari, K., & Agus Pranoto, Y. (2023). Metode Regresi Linier Berganda Untuk Prediksi Omset Penyewaan Kamera Di Joe Kamera. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(1), 852–858. <https://doi.org/10.36040/jati.v7i1.6158>
- Anggi Erlangga, M. Reza Falevi, Piliyanti Putri, & Muhammad Kurniawan. (2024). Pengaruh Upah Minimum dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2014-2023. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 161–177. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i2.191>
- Badria, F. A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2011-2020. *EKONOMI DAN BISNIS: Percikan Pemikiran*. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XINEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA58&dq=upa+h+minimum+and+pertumbuhan+ekonomi&ots=ZoCqYGw2MN&sig=F\\_BKOXutN2ZPsyru1eYvhQgPq5g%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/15983/1/210717168\\_frida%20ayu%20badria.pdf](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XINEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA58&dq=upa+h+minimum+and+pertumbuhan+ekonomi&ots=ZoCqYGw2MN&sig=F_BKOXutN2ZPsyru1eYvhQgPq5g%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/15983/1/210717168_frida%20ayu%20badria.pdf)
- Darsana, I. B. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umk, Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9, 57-72. <http://dx.doi.org/10.24843/EEB.2020.v09.i01.p04>
- Juliandi Azuar, irfan, M. S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep Dan Aplikasi* (Z. Fahrizal (ed.)). UMSU PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=0X-rBAAQBAJ&lpq=PA1&ots=ePY7qQstk2&dq=METODOLOGI PENELITIAN BISNIS&lr&pg=PA1#v=thumbnail&q=METODOLOGI PENELITIAN BISNIS&f=true>
- Khusnul, K. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di DIY Tahun 2009-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi, Volume 7*, 599–609. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/13017>
- Kurniawan, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i2.18>
- Linggawati, N. W., & Wenagama, I. W. (2022). Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Upah Terhadap Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Karangasem. *E-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana*, 11(04), 400. <https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i04.p02>
- Ningsi, M. N. (2023). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Pengangguran Di Provinsi Aceh. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.
- Olivia, Y. S., & Widanta, A. A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(06), 1186-1195. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i06.p16>
- Padilah, T. N., & Adam, R. I. (2019). Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang. *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika*, 5(2), 117. <https://doi.org/10.24853/fbc.5.2.117-128>
- Pasuria, S., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Upah Minimum, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pengangguran di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 795–808. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.94>
- Ila Salsabila, Suhaeda Nabila, Risma Ayu Rianti, Dhimas Priyoga, & Agus Eko Sujianto. (2023). Pengaruh Saukina Upah Minimum Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Periode 2018-2022. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1), 92–107. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.885>
- Silvie, F. D., & Hasmarini, M. I. (2023). Economics and Digital Business Review Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, IPM, PDRB dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. *Economics and Digital*

*Business Review*, 4(1), 374–382.

<https://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/355%0Ahttps://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/download/355/211>. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i1.355>

Suriati. (2020). Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Upah Minimum dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan*, 10(3), 5.

Yeimo, J. E. F., & Ayuningsasi, A. A. K. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Regional, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kawasan Non-Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(11). <https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i11.p02>